

## **Tradisi Dua Kekuasaan Dalam Pilkada (*Perspektif Modal Sosial*)**

**Oleh: Muhammad Rafiq**

Diskursus tentang pilkada pasti mengarah pada bagaimana merebut kekuasaan dan investasi kekuasaan jangka panjang. Secara konstitusional pilkada merupakan perwujudan konsep demokrasi Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam menentukan generasi kepemimpinan.

Dalam proses pilkada, terdapat dua kekuasaan yang berperan aktif, berlawanan bahkan saling berpasangan. Dua kekuasaan itu adalah kekuasaan politik dan kekuasaan birokrat. Pada penjelasannya, kekuasaan politik identik dengan keberadaan partai politik memenangkan kandidat yang diusungnya dengan mengadakan kampanye, pengenalan figur ke masyarakat. Kekuasaan kedua adalah birokrat. Birokrat pasti berbicara tentang pemerintahan. Dalam pemerintahan terdapat pejabat-pejabat tinggi yang menguasai pemerintah menentukan jalannya suatu pemerintahan. Dalam konteks pilkada, peranannya terlihat bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih lewat desain peraturan tentang pilkada.

*Pertama*, dalam tahapan mendekati penetapan calon, partai mulai mendekati dan memperkenalkan kandidat yang akan diusungnya dengan cara turun kemasyarakat membawa ragam program untuk menarik simpati suara. Kemudian menggunakan media memasukkan iklan-iklan kandidat dengan tujuan yang sama. Hal ini dilakukan agar pada saat pencalonan kandidat masa suara tetap terjaga dan kerja-kerja tim bisa berlanjut ke tahap yang lebih serius. Dengan kata lain, meraih massa agar kandidat yakin bisa memenangkan pertarungan.

*Kedua*, birokrat berperan tidak seperti partai. Dalam konstitusi, PNS atau pejabat daerah tidak boleh terlibat dalam proses pilkada dalam bentuk apapun, baik itu kampanye, bergabung dalam partai, hingga instruksi partai. Peranan ini seringkali tidak terbaca oleh konstitusi. Para pejabat melakukan kerja-kerja politik menggunakan jabatan untuk mempengaruhi masyarakat. Dalam pandangan umumnya, ketika pejabat dikenal ahklaknya baik dan bersih, maka ketika pilihan pejabat tersebut akan diikuti masyarakat. Terlebih jika incumbent, rasa takut tidak memenangkan pimpinannya pasti terjadi. Seringkali berdialog dengan para pejabat, muncul kata-kata *jangan sampai nanti nonjob jika tidak dipilih* atau *posisi diganti dan dimutasi ke daerah lain*. Pandangan ini yang kemudian para pejabat harus mendukung pimpinannya agar mendapat posisi yang lebih segar dari sebelumnya. Hal yang seperti ini memang tidak menjadi masalah. Jika dikaji kali, ada ruang yang terbuka bagi para partai merangkul orang-orang tersebut untuk masuk dalam strategi kemenangan. Hal seperti ini dapat disebut dengan Officialdom (kerajaan pejabat). Menurut Mifta Thoha ini birokrasi seperti ini sudah mulai memudar. Akan tetapi, Officialdom muncul pada proses pilkada. Pejabat adalah raja-raja yang

harus dipatuhi, jika tidak maka pemerintah adalah pusat sentral pelayanan masyarakat tidak akan terjamin bagi yang tidak mengikuti perintah raja-raja. Sederhananya, ketika pejabat berkata A, maka masyarakat disekitarnya harus mengikuti juga. Jika tidak akan terjadi dampak, dampak kepada pejabat itu sendiri karena tidak berhasil memenangkan pimpinannya.

Menurut Alejandro Portes (1998), peneliti yang pertama merumuskan modal sosial adalah sosiolog Prancis Pierre Bourdieu. Berangkat dari kajiannya tentang bentuk-bentuk modal, yakni modal kultural dan modal simbolik, Pierre Bourdieu (1986) merumuskan modal adalah keseluruhan sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan atas jaringan yang bersifat tahan lama; jaringan dilembagakan melalui hubungan pengenalan dan pengakuan; jaringan juga dilembagakan melalui keanggotaan dalam sebuah kelompok yang menyediakan dukungan modal yang dimiliki secara kolektif kepada setiap anggota, sebuah jaminan kepercayaan yang memberikan hak kepada mereka untuk memandatkannya dalam beragam bentuknya di dunia.

Modal sosial menentukan efektifnya kerja-kerja politik memenangkan kandidat. Dua kekuasaan dalam pilkada masing-masing memiliki jaringan dan sumber daya yang bergerak diberbagai lini sector. Partai politik memiliki kekuatan jaringan dan sumber daya yang berkompeten dalam pentas politik. Para kader-kader partai dilengkapi dengan kekuatan dana, komunikasi antar massa, dan informasi strategis. Sumber daya partai semakin kuat karena didukung dengan jaringan-jaringan pemilik modal sebagai penyuplai untuk sampai akses ke public. Sedangkan para aktor birokrat memiliki kemampuan tidak seperti kader-kader partai. Jaringan terkuat dalam birokrat adalah jaringan struktural dan sumber daya yang memiliki posisi terpenting dalam birokrat. Jaringan struktur bergerak melalui intervensi pimpinan hingga struktur paling bawah. Para pejabat tidak memperlihatkan gerakan tersebut, tapi lebih pada bagaimana system dan aturan digunakan untuk mengikat dan menekan para pemilik struktur untuk mengikuti kemauan pimpinan.

Modal sosial ini masih cenderung negatif jika digunakan untuk kepentingan tertentu. Alejandro Portes (1998) mengulas modal sosial pada dimensi negatif. *Pertama*, ikatan kuat antar anggota yang memberikan keuntungan bagi seluruh anggota pada saat yang sama juga bisa menghambat pihak lain untuk turut mengakses modal sosial. *Kedua*, klaim anggota yang eksklusif yang malah menghambat keberhasilan anggota. *Ketiga*, komunitas kerap meminta harmoni dari seluruh anggota. Dicontohkan oleh Portes (1998) bagaimana seseorang bisa tenang meninggalkan anak bermain di taman karena anaknya akan diawasi oleh seluruh anggota komunitas tempat ia tinggal. Tetapi pada saat yang sama situasi ini membebani anggota komunitas yang lain sehingga mereka yang muda dan lebih independen akan cenderung pergi meninggalkan komunitasnya. *Keempat*, ada situasi dimana solidaritas kelompok direkatkan oleh pengalaman bersama di saat-saat sulit. Tetapi kebersamaan ini kemudian justru menghambat seseorang untuk berhasil karena dia akan meninggalkan kelompok. Solidaritas dan kepercayaan

yang mengikat yang mendorong keberhasilan dan kewirahusaan juga bisa berakibat sebaliknya karena memaksa anggota untuk terus bersama dengan kelompoknya meskipun dengan akibat sulit mencapai keberhasilan.

Dalam konteks tradisi kekuasaan pada pilkada, modal sosial bisa menjadi negative seperti yang telah dijelaskan oleh Postes. *Pertama*, modal sosial negative bisa melahirkan oligarki. Kekuatan dana dan jabatan memberikan keuntungan bagi para anggota sehingga anggota diluar tidak dapat memasuki modal sosial tersebut. Hal ini bisa mengakibatkan anggota tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengikuti apa instruksi dari actor-aktor dalam kelompok oligarki tersebut. *Kedua*, inderdependensi anggota semakin tinggi. Jika dalam dua kekuasaan tersebut memiliki pemilik modal yang banyak dan kuat, maka anggota bergantung pada mereka dengan memohon peluang jabatan atau investasi politik jangka panjang. Investasi politik dilakukan untuk menabung kekuatan pada pertarungan berikutnya dengan system pemilik modal menyuplai dana dengan tawarannya berupa program, keleluasaan aturan, hingga sedikitnya bisa mengendalikan pemerintahan. *Ketiga*, tingkat kekecewaan semakin tinggi. Anggota dalam dua kekuasaan ini tidak mampu bertahan karena selalu diawasi ketat. Selalunya diawasi ini membuat anggota tidak betah dan pelan-pelan pergi meninggalkan kelompoknya.

Belajar dari modal sosial, kita harus berhati-hati terhadap peranan dua kekuasaan dalam pilkada. Jangan sampai terlibat dalam kasus hukum, apalagi masuk dalam modal sosial negatif seperti realitas yang terjadi pada tradisi dua kekuasaan. Menurut Portes dalam modal sosial negatif, ketika sudah masuk kedalam sama halnya dia mengikat dan mengendalikan kita hingga memangkas independen anggota.